

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era reformasi ini setiap negara pasti menginginkan pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good government governance* diseluruh dunia, terutama Indonesia. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai 1 januari 2001 pemerintah memberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, juga Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggara otonomi daerah.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut segala hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom diserahkan oleh pemerintahan ke daerah otonom. Hal tersebut bertujuan agar pemerintahan daerah yakni provinsi, kabupaten dan kota bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah (Mardiasmo, 2017).

Dalam pengelolaan keuangannya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dalam pasal 32 tentang Keuangan Negara, pemerintah

memberlakukan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 yang saat ini diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik kualitatif relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi keuangan daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Oleh karena itu, membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan paham mengenai sistem standar akuntansi pemerintahan. Terutama Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) merupakan SDM yang sangat wajib untuk memahami SAP berbasis akrual. Selain PPK faktor lain yang mendorong suatu laporan keuangan itu berkualitas adalah kompetensi serta kemampuan dari setiap pegawai dalam membantu penyusunan laporan keuangan tersebut. Menurut Sukrino Agoes (2012) Kompetensi adalah

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*), yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Setiap tahunnya BPK memberikan penilaian pada LKPD. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan

Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan Semester (IHPS) I perwakilan Kota Bandung Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Kota Bandung

| Tahun Anggaran | Opini |
|-----------------------|--------------|
| 2014 | WDP |
| 2015 | WDP |
| 2016 | WDP |
| 2017 | WDP |
| 2018 | WTP |

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2014-2018, 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2017 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kini LKPD tahun anggaran 2018 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (Sumber: www.bandung.bpk.go.id)

Namun, meskipun pada tahun 2018 sudah mendapatkan opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan bukan berarti bebas dari kelemahan dan kesalahan. Kelemahan dan kesalahan tersebut diakibatkan karena dinas-dinas yang berada

dibawah pemerintahan kota Bandung belum melaksanakan tata kelola keuangan dan pelaporan yang optimal termasuk Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintah dibidang pendidikan khususnya pada pendidikan usia dini, Pendidikan Non Formal serta ketatausahaan dinas.

Dinas Pendidikan Kota Bandung masih memiliki kendala atau kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai penatausahaan dan peraturan keuangan daerah terutama pada satuan perangkat kerja daerah sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya sempurna. Menurut Amisepti (2019) terdapat beberapa kendala pada yang sering ditemukan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya tanggung jawab dalam membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) administratif dan SPJ Fungsional disetiap transaksi yang harus disampaikan paling lambat 10 bulan berikutnya kepada pengguna anggaran dan bendahara umum. Jika tidak ada SPJ, maka tidak ada pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya pada pemeriksaan laporan keuangan akhir tahun anggaran sering ditemukannya sisa atau tambahan uang persediaan (UP) yang belum disetorkan kembali ke rekening kas daerah.
2. Dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan (CaLK) masih mengalami kesulitan.

3. Berdasarkan wawancara awal dengan bagian keuangan, terdapat kendala pada pencatatan bagian asset persediaan pada jumlah sisa alat tulis kantor (ATK) yang tidak dicatat atau dilaporkan, padahal seharusnya anggaran tersebut dilaporkan dan dimasukkan ke dalam pos SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan)

Dari hasil penelitian Lia Hanifa (2016) dan Mis Widya Andelina (2017) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan Putriasri (2017) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik dan berkeinginan meneliti lebih jauh tentang Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pegawai, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Khususnya di Dinas Pendidikan Kota Bandung, dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pegawai Staf Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kemampuannya dibidang penatausahaan keuangan daerah

2. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah dalam bidang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami di Dinas Pendidikan Kota Bandung
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pegawai terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai di penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pegawai terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kemampuannya dibidang penatausahaan keuangan daerah
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan daerah dalam bidang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami di Dinas Pendidikan Kota Bandung
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pegawai terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis sehubungan dengan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pegawai terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta evaluasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pegawai pejabat penatausahaan keuangan dan pegawai terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, perbandingan, referensi untuk penelitian selanjutnya, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Jl. Jendral Ahmad Yani No.237, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40113.

1.5.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis yaitu selama 2 bulan, dimulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 April 2020 melalui proses magang.



IKOPIN